



Aktivisme digital pemuda dan budaya populer dalam gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw

Asti Lestari¹, Exsalliany Dewanty¹, Gina Aulia¹, Isna Quintana¹, Junaheni Afifah¹, Nida Dhiya¹, Siti Komariah¹, Fajar Nugraha¹

¹Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial., Universitas Pendidikan Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Dikirimkan 18/02/2026

Direvisi 21/03/2026

Diterima 01/05/2026

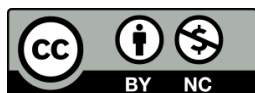
Kata kunci:

Aktivisme digital
Gerakan sosial
Partisipasi pemuda
Media sosial
Mobilisasi massa

Keywords:

Digital activism
Social movements
Youth participation
Social media
Mass mobilization

This is an open access article
under the [CC BY-NC](#) license.



Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena aktivisme digital pemuda dalam gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw dengan fokus pada ketahanan gerakan hingga tahun 2025. Berbeda dengan studi sebelumnya, penelitian ini menyoroti penggunaan budaya populer (*pop-culture*) sebagai strategi perlawanan baru. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling, penelitian ini menganalisis 60 postingan viral di platform X (Twitter) yang dikumpulkan pada Oktober-November 2025. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, penggunaan meme satir seperti "Dewan Pertahanan Raja" efektif mendelegitimasi institusi politik. Kedua, adanya apropriasi budaya K-Pop (seperti lirik lagu EXO) yang memperluas jangkauan isu ke demografi non-politis. Ketiga, gerakan ini bersifat hibrida, di mana konten digital seperti simbolisasi "Patung Tikus" digunakan untuk memobilisasi aksi nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme digital pemuda telah berevolusi menjadi ingatan kolektif yang terus hidup (*living memory*) dan mampu beradaptasi dengan tren budaya kontemporer.

Abstract

This study examines the phenomenon of youth digital activism in the #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw movements, focusing on the sustainability of the movements until 2025. Unlike previous studies, this research highlights the use of pop culture as a new resistance strategy. Using qualitative methods with purposive sampling techniques, this study analyzes 80 viral posts on the X (Twitter) platform collected in October-November 2025. The results of the study show three main findings. First, the use of satirical memes such as "Dewan Pertahanan Raja" (King's Defense Council) effectively delegitimizes political institutions. Second, the appropriation of K-Pop culture (such as EXO song lyrics) expands the reach of the issue to non-political demographics. Third, this movement is hybrid in nature, where digital content such as the symbolism of the "Rat Statue" is used to mobilize real action. This study concludes that youth digital activism has evolved into a living collective memory that is able to adapt to contemporary cultural trends.

Penulis Korespondensi

Nida Dhiya

Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia

Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154. Jawa Barat, Indonesia

Email: nidadhiyaulhal@upi.edu

1. PENDAHULUAN

Era digital telah mengubah lanskap partisipasi politik dan gerakan sosial di Indonesia secara fundamental. Penetrasi internet yang mencapai lebih dari 70% penduduk Indonesia telah membuka ruang baru bagi ekspresi politik dan mobilisasi massa, khususnya di kalangan generasi muda (Wahyuningroem et al., 2024; Nugroho, 2025). Platform media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook tidak lagi sekadar menjadi ruang interaksi sosial, tetapi telah bertransformasi menjadi arena politik yang memungkinkan warga negara untuk menyuarakan aspirasi, mengorganisir gerakan kolektif, dan mempengaruhi kebijakan publik (Ahmad & Setyawati, 2024; Rahmawan et al., 2020).

Aktivisme digital dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi digital dan media sosial untuk mempromosikan perubahan sosial, politik, dan ekonomi melalui kampanye virtual, gerakan hashtag, dan berbagai bentuk aksi kolektif online (Wendratama, 2025; Asmiyono & Rahmawati, 2025). Fenomena ini mulai berkembang signifikan di Indonesia sejak gerakan Save KPK pada tahun 2009, yang menjadi penanda awal kesuksesan aktivisme digital dalam mempengaruhi kebijakan publik (Suwana, 2020). Sejak itu, berbagai gerakan sosial digital terus bermunculan sebagai respons terhadap isu-isu krusial yang terjadi di Indonesia, mulai dari korupsi, lingkungan, hingga persoalan buruh dan demokrasi (Bahri & Widhyharto, 2021).

Salah satu momentum penting dalam sejarah aktivisme digital Indonesia adalah munculnya gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw pada periode 2019-2020. Kedua gerakan ini melibatkan partisipasi masif dari generasi muda yang memanfaatkan media sosial, terutama Twitter, sebagai ruang untuk membangun narasi, melakukan mobilisasi massa, dan membentuk identitas politik kolektif (Wahyuningroem et al., 2024; Salma, 2024). Gerakan #ReformasiDikorupsi muncul sebagai bentuk penolakan terhadap revisi beberapa undang-undang yang dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi, sementara #TolakOmnibusLaw merupakan gerakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan buruh dan lingkungan.

Karakteristik unik dari aktivisme digital di Indonesia adalah sifatnya yang hybrid, menggabungkan strategi gerakan online dan offline secara simultan (Salma, 2024; Nugroho, 2025). Gerakan-gerakan ini tidak berhenti pada aktivisme klik (clicktivism) berupa like, share, dan retweet, tetapi mampu menggerakkan aksi nyata di jalanan melalui demonstrasi massal. Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme digital di Indonesia telah melampaui kritik sebagai "slacktivism" atau aktivisme malas, dan mampu menghasilkan dampak politik yang signifikan (Ahmad & Setyawati, 2024; Sulaiman, 2024).

Fenomena aktivisme digital di Indonesia mencerminkan transformasi fundamental dalam cara generasi muda berpartisipasi dalam politik dan proses demokratis. Media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi telah menjadi infrastruktur politik baru yang memungkinkan terciptanya ruang publik alternatif di luar mekanisme politik formal. Melalui platform digital, generasi muda dapat mengorganisir diri secara horizontal, membangun solidaritas lintas geografis, dan memberikan tekanan langsung kepada pengambil kebijakan tanpa perlu bergantung pada struktur organisasi tradisional.

Namun demikian, perkembangan aktivisme digital di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan kompleks. Penyempitan ruang sipil, represi digital oleh negara, kampanye disinformasi oleh buzzer, hingga kesenjangan digital antara Indonesia Barat dan Timur menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh para aktivis digital (Lim, 2025; Rahmawan et al., 2020). Selain itu, algoritma media sosial dan logika platform juga mempengaruhi visibilitas dan efektivitas gerakan sosial digital, sehingga aktivis perlu memahami mekanisme platform untuk memaksimalkan jangkauan kampanye mereka.

Meskipun studi tentang aktivisme digital sudah banyak dilakukan, rata-rata penelitian sebelumnya hanya fokus pada seberapa banyak orang yang ikut demo atau bagaimana tagar menjadi viral. Belum banyak yang menyoroti bagaimana anak muda meminjam budaya populer, seperti lirik lagu K-Pop atau meme satir yang digunakan sebagai bahasa perlawanan mereka. Selain itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan melihat rentang waktu yang lebih panjang hingga tahun 2025, gerakan ini terbukti bukan sekadar tren sesaat, melainkan telah membentuk ingatan kolektif yang terus hidup dan berevolusi di benak generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam strategi dan mekanisme aktivisme digital yang diterapkan dalam gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw, memahami peran media sosial dalam proses pembentukan identitas politik dan mobilisasi partisipasi pemuda, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial digital di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat gerakan masyarakat sipil melalui aktivisme digital yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami dinamika partisipasi politik generasi muda di era digital.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis konten (content analysis) terhadap data digital dan studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena aktivisme digital dan partisipasi pemuda dalam gerakan sosial #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi digital pada platform media sosial X (Twitter) yang dilakukan selama periode Oktober - November 2025. Proses penarikan data (data crawling) dilakukan secara spesifik pada tanggal 20 November 2025 dengan memfokuskan pada dua tagar utama, yaitu #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yang dipilih dengan memanfaatkan fitur filter pencarian 'Top' (terpopuler) untuk menjangkau postingan dengan engagement tinggi, serta fitur 'Latest' (terbaru) untuk melihat keberlanjutan narasi gerakan. Dari hasil penelusuran tersebut, sebanyak 60 postingan (tweet) yang relevan dipilih sebagai data set utama. Kriteria inklusi data meliputi postingan yang memuat narasi tuntutan, penggunaan elemen visual (meme/poster) yang strategis, serta interaksi yang merepresentasikan dinamika mobilisasi massa digital. Postingan yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk mengidentifikasi pola strategi dan pembingkai isu (framing). Selanjutnya, studi literatur dilakukan dengan mengkaji berbagai publikasi ilmiah dari jurnal bereputasi untuk membangun kerangka teoritis dan memahami konteks gerakan sosial digital di Indonesia.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pengkodean (coding) konten digital untuk mengidentifikasi tema, pola, dan strategi aktivisme yang digunakan. Kedua, kategorisasi data berdasarkan dimensi-dimensi aktivisme digital seperti pembentukan narasi, mobilisasi massa, dan pembangunan identitas kolektif. Ketiga, interpretasi data dengan merujuk pada teori gerakan sosial dan literatur aktivisme digital. Keempat, triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan analisis konten yang mencakup indikator-indikator aktivisme digital seperti jenis konten, strategi komunikasi, pola mobilisasi, dan respons publik. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi karakteristik, strategi, dan dampak dari kedua gerakan sosial digital tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Strategi Aktivisme Digital dalam Gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw

Gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw menunjukkan pola strategi aktivisme digital yang terstruktur dan sistematis. Kedua gerakan ini memanfaatkan platform Twitter sebagai ruang utama untuk membangun narasi publik, mengorganisir massa, dan melakukan kampanye viral (Wahyuningroem et al., 2024; Nugroho, 2025). Strategi utama yang digunakan adalah pembentukan hashtag sebagai identitas kolektif dan alat mobilisasi yang memungkinkan partisipan dari berbagai latar belakang untuk bersatu dalam tujuan yang sama (Ahmad & Setyawati, 2024).

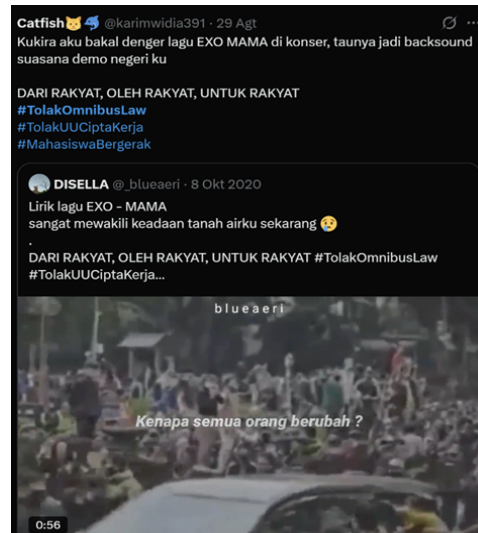
Aktivis digital dalam kedua gerakan ini menggunakan pendekatan multi-platform dengan mengombinasikan Twitter untuk penyebaran cepat informasi, Instagram untuk konten visual yang menarik perhatian generasi muda, dan WhatsApp untuk koordinasi internal dan mobilisasi offline (Rahmawan et al., 2020; Salma, 2024). Strategi ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang karakteristik dan kekuatan masing-masing platform media sosial dalam konteks gerakan sosial (Sulaiman, 2024). Kesuksesan strategi aktivisme digital dalam kedua gerakan ini terletak pada kemampuan para aktivis untuk mengadaptasi logika platform media sosial dengan tujuan politik mereka. Mereka tidak hanya menggunakan media sosial sebagai alat penyebaran informasi, tetapi juga memahami bagaimana algoritma bekerja dan memanfaatkannya untuk memaksimalkan jangkauan dan visibilitas gerakan. Penggunaan konten visual yang menarik, narasi yang emosional namun berdasar fakta, serta timing yang tepat dalam posting konten menjadi kunci untuk menciptakan momentum viral.

Untuk memperkuat argumen mengenai strategi visual dan narasi, penelitian ini menganalisis beberapa konten viral yang memperlihatkan karakteristik unik dari gerakan ini. Gambar 1 menunjukkan bagaimana humor satir digunakan untuk mendesakralisasi lembaga negara. Salah satu konten populer yang beredar luas mengubah akronim DPR menjadi "Dewan Pertahanan Raja" dengan visualisasi gedung parlemen yang dijaga militer. Dalam poster digital tersebut, fungsi komisi-komisi DPR dipelesetkan secara sarkastik, seperti "Komisi 1: Kebun Sawit" hingga "Komisi 3: Ternak Buzzer". Temuan ini mengonfirmasi bahwa aktivisme digital pemuda tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga subversif dengan menggunakan meme internet untuk membongkar (delegitimasi) wibawa institusi politik formal yang dianggap tidak memihak rakyat.



Gambar 1. Meme Satir "Dewan Pertahanan Raja" yang mendekonstruksi fungsi DPR
(Sumber: X, @Intan__1_)

Selain satire politik, strategi pelibatan budaya populer (pop-culture) juga berpengaruh. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, aktivis digital mengadopsi lirik lagu dari grup K-Pop EXO berjudul "MAMA" untuk menyuarakan keresahan mereka. Kutipan lirik "Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat" disandingkan dengan tagar #TolakOmnibusLaw, menciptakan getaran emosional yang kuat di kalangan penggemar K-Pop (K-popers). Strategi ini efektif memperluas jangkauan isu dari sekadar aktivis politik tradisional ke demografi penggemar budaya pop yang sebelumnya dianggap apolitis.



Gambar 2. Apropriasi Budaya Populer (K-Pop) dalam narasi perlawanan #TolakOmnibusLaw
(Sumber: X, @karimwidia39)

Selain itu, data lapangan juga menunjukkan adanya hibriditas gerakan yang kuat antara dunia maya dan nyata. Seperti yang diunggah akun @FraksiRakyatID, akun tersebut menggunakan aplikasi X (Twitter) untuk mempublikasikan simbolisasi aksi jalanan berupa patung tikus berdasi yang memegang papan bertuliskan "UU No. 6 Tahun 2023 Cipta Kerja". Visualisasi ini tidak hanya mendokumentasikan aksi "Sejuta Buruh", tetapi juga membingkai narasi bahwa kebijakan tersebut adalah produk yang cacat secara moral. Dokumentasi visual semacam ini kemudian disebar ulang (*retweet*) secara masif untuk menjaga momentum #TolakOmnibusLaw tetap hidup di linimasa, membuktikan bahwa konten digital berfungsi sebagai bahan bakar untuk eskalasi aksi di lapangan.



Gambar 3. Simbolisasi Tikus dalam Aksi Buruh yang diviralkan kembali secara digital
(Sumber: X, @FraksiRakyatID)

Karakteristik penting lainnya adalah sifat hybrid dari kedua gerakan ini, yang menggabungkan aktivisme online dengan aksi offline (Salma, 2024; Nugroho, 2025). Media sosial digunakan untuk membangun kesadaran publik, mengorganisir demonstrasi, dan mendokumentasikan aksi di lapangan. Dokumentasi aksi offline kemudian disebarluaskan kembali melalui media sosial, menciptakan siklus mobilisasi yang berkelanjutan (Wahyuningroem et al., 2024; Asmiyono & Rahmawati, 2025).

Kedua gerakan juga memanfaatkan strategi framing atau pembingkai isu yang efektif. Gerakan #ReformasiDikorupsi membingkai isu revisi UU sebagai ancaman terhadap agenda anti-korupsi dan demokrasi, sementara #TolakOmnibusLaw membingkai Undang-Undang Cipta Kerja sebagai kebijakan yang merugikan buruh dan lingkungan (Wahyuningroem et al., 2024; Ahmad & Setyawati, 2024). Pembingkai ini berhasil menarik simpati publik luas dan membangun koalisi lintas sektor.

3.2. Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Politik dan Mobilisasi Massa

Media sosial memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas politik kolektif generasi muda Indonesia. Melalui platform digital, para aktivis muda mampu membangun narasi bersama yang mencerminkan nilai-nilai, aspirasi, dan visi politik mereka (Nugroho, 2025; Wendratama, 2025). Hashtag seperti #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw tidak hanya berfungsi sebagai penanda topik, tetapi juga menjadi simbol identitas politik yang menghubungkan individu-individu dengan pandangan serupa dalam komunitas virtual (Wahyuningroem et al., 2024).

Proses pembentukan identitas politik ini terjadi melalui interaksi intensif di media sosial, di mana partisipan saling berbagi informasi, pengalaman, dan perspektif (Ahmad & Setyawati, 2024; Sulaiman, 2024). Melalui like, retweet, dan komentar, individu tidak hanya mengonsumsi konten politik tetapi juga aktif memproduksi dan mendistribusikan narasi yang memperkuat identitas kolektif gerakan (Lim, 2025). Penulis berargumen bahwa media sosial telah menciptakan bentuk partisipasi politik baru yang lebih inklusif dan demokratis. Berbeda dengan struktur politik tradisional yang hierarkis dan terpusat, aktivisme digital memungkinkan partisipasi horizontal di mana setiap individu dapat berkontribusi dalam membentuk agenda dan strategi gerakan. Ini mencerminkan transformasi dari model kepemimpinan top-down menuju model jaringan yang lebih egaliter.

Mobilisasi massa melalui media sosial juga menunjukkan efektivitas yang signifikan. Gerakan #ReformasiDikorupsi berhasil mengumpulkan ribuan tweet dalam waktu singkat dan mendorong puluhan ribu orang turun ke jalan untuk demonstrasi (Wahyuningroem et al., 2024; Rahmawan et al., 2020). Demikian pula, gerakan #TolakOmnibusLaw berhasil memobilisasi demonstrasi massal di berbagai kota di Indonesia secara simultan (Salma, 2024; Nugroho, 2025). Kecepatan dan skala mobilisasi ini dimungkinkan oleh karakteristik media sosial yang memfasilitasi penyebaran informasi secara viral dan membangun sense of urgency di kalangan publik (Ahmad & Setyawati, 2024; Asmiyono & Rahmawati, 2025). Kombinasi antara konten yang resonan secara emosional dengan informasi faktual tentang waktu dan lokasi aksi membuat mobilisasi menjadi sangat efektif.

Temuan menarik dalam penelitian ini yang berbeda dari kajian Nugroho (2025) adalah adanya penggunaan simbol budaya populer yang spesifik. Generasi muda tidak menggunakan bahasa politik yang kaku seperti aktivis 98. Sebaliknya, mereka menggunakan apa yang mereka sukai, seperti penggemar K-Pop yang mengutip lirik lagu grup EXO untuk menyuarakan ketidakadilan. Ini menunjukkan bahwa aktivisme digital hari ini jauh lebih cair, seseorang tidak perlu menjadi 'aktivis mahasiswa' dulu untuk peduli politik, mereka cukup menjadi dirinya sendiri, seperti seorang penggemar musik yang resah dengan negaranya. Media sosial juga memainkan peran penting dalam mempertahankan momentum gerakan. Melalui dokumentasi dan penyebaran konten tentang aksi-aksi di lapangan, media

sosial membantu menjaga perhatian publik dan mendorong partisipasi berkelanjutan (Wahyuningroem et al., 2024; Wendratama, 2025). Narasi tentang keberanian aktivis, solidaritas antar-demonstran, dan tuntutan perubahan terus diproduksi dan disebar untuk mempertahankan energi gerakan.

3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Aktivisme Digital

Efektivitas aktivisme digital dalam gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Pertama, aksesibilitas dan penetrasi internet yang tinggi di Indonesia menjadi prasyarat fundamental bagi keberhasilan mobilisasi digital (Rahmawan et al., 2020; Nugroho, 2025). Namun, kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural masih menjadi tantangan yang membatasi inklusivitas gerakan (Lim, 2025).

Kedua, kemampuan aktivis dalam memanfaatkan algoritma dan logika platform media sosial mempengaruhi visibilitas dan jangkauan gerakan (Rahmawan et al., 2020; Lim, 2025). Pemahaman tentang waktu optimal untuk posting, penggunaan konten visual yang menarik, dan strategi engagement dengan pengguna lain menjadi faktor krusial dalam memaksimalkan efektivitas kampanye digital (Ahmad & Setyawati, 2024). Ketiga, kredibilitas dan kualitas informasi yang disebar mempengaruhi dukungan publik terhadap gerakan. Aktivis yang mampu menyajikan data dan argumen yang valid cenderung lebih berhasil dalam membangun legitimasi gerakan (Wahyuningroem et al., 2024; Wendratama, 2025). Sebaliknya, penyebaran informasi yang tidak akurat dapat merusak kredibilitas dan mengurangi dukungan publik (Asmiyono & Rahmawati, 2025). Penulis berargumen bahwa efektivitas aktivisme digital tidak hanya ditentukan oleh faktor teknis atau strategis, tetapi juga oleh konteks politik dan sosial yang lebih luas. Timing gerakan dalam kaitannya dengan momentum politik nasional, tingkat sensitivitas isu yang diangkat, dan respons pemerintah terhadap tuntutan gerakan semuanya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan gerakan sosial digital.

Keempat, kemampuan gerakan untuk membangun koalisi lintas sektor dan menjangkau berbagai segmen masyarakat menentukan skala dan dampak gerakan (Salma, 2024; Nugroho, 2025). Gerakan yang mampu mengintegrasikan berbagai kelompok kepentingan dan membangun narasi yang inklusif cenderung lebih efektif dalam mencapai tujuannya (Wahyuningroem et al., 2024). Kelima, dukungan dari figur publik, influencer, dan media massa konvensional juga mempengaruhi efektivitas aktivisme digital (Ahmad & Setyawati, 2024; Sulaiman, 2024). Ketika gerakan digital mendapat amplifikasi dari aktor-aktor berpengaruh ini, jangkauan dan legitimasinya meningkat secara signifikan.

3.4. Tantangan dan Hambatan Aktivisme Digital di Indonesia

Aktivisme digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan sistemik yang kompleks. Pertama, penyempitan ruang sipil dan represi digital oleh negara menjadi ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan berorganisasi secara online (Lim, 2025; Wendratama, 2025). Penggunaan undang-undang ITE untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah telah menciptakan efek menakutkan (chilling effect) di kalangan aktivis digital (Salma, 2024).

Kedua, kampanye disinformasi dan manipulasi opini publik melalui buzzer dan akun-akun palsu menjadi tantangan besar bagi kredibilitas gerakan sosial digital (Lim, 2025; Asmiyono & Rahmawati, 2025). Strategi counter-narrative yang disponsori negara atau kelompok kepentingan tertentu dapat mengaburkan pesan gerakan dan memecah belah dukungan publik (Rahmawan et al., 2020). Ketiga, algoritma media sosial yang cenderung memprioritaskan konten yang menghasilkan engagement tinggi dapat menciptakan echo chamber dan polarisasi (Lim, 2025; Ahmad & Setyawati, 2024). Hal ini dapat mengurangi

efektivitas gerakan dalam menjangkau kelompok di luar basis pendukung inti mereka (Nugroho, 2025). Tantangan terbesar aktivisme digital di Indonesia saat ini adalah bagaimana mempertahankan momentum dan keberlanjutan gerakan di tengah represi digital yang semakin intensif. Banyak gerakan yang mampu menciptakan momentum viral dalam jangka pendek tetapi kesulitan untuk mentransformasi momentum tersebut menjadi perubahan struktural yang berkelanjutan.

Keempat, kesenjangan digital dan literasi media yang tidak merata di Indonesia menciptakan ketimpangan partisipasi dalam gerakan sosial digital (Rahmawan et al., 2020; Nugroho, 2025). Gerakan cenderung didominasi oleh kalangan urban, terdidik, dan memiliki akses internet yang baik, sementara kelompok marginal dan masyarakat di wilayah terpencil kurang terwakili (Wahyuningroem et al., 2024). Kelima, fragmentasi gerakan dan kurangnya koordinasi antara berbagai kelompok aktivis dapat mengurangi efektivitas tekanan terhadap pemerintah (Salma, 2024; Asmiyono & Rahmawati, 2025). Meskipun media sosial memfasilitasi mobilisasi cepat, ia tidak selalu efektif dalam membangun struktur organisasi yang solid dan berkelanjutan (Wendratama, 2025).

3.5. Implikasi dan Prospek Aktivisme Digital di Indonesia

Fenomena aktivisme digital dalam gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw memiliki implikasi luas bagi masa depan demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Pertama, aktivisme digital telah mendemokratisasi akses terhadap ruang publik politik dan memungkinkan generasi muda untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik tanpa harus bergantung pada struktur politik formal (Nugroho, 2025; Wendratama, 2025).

Kedua, gerakan sosial digital telah membuktikan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk mengawasi pemerintah, mendorong transparansi, dan meminta akuntabilitas publik (Wahyuningroem et al., 2024; Ahmad & Setyawati, 2024). Tekanan publik yang terorganisir melalui media sosial telah memaksa pemerintah untuk lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat, meskipun tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan yang diinginkan (Salma, 2024).

Ketiga, aktivisme digital telah mengubah lanskap gerakan sosial dari model yang hierarkis dan terpusat menjadi model jaringan yang lebih horizontal dan terdesentralisasi (Lim, 2025; Asmiyono & Rahmawati, 2025). Model ini memiliki kelebihan dalam hal fleksibilitas dan kemampuan adaptasi, tetapi juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan keberlanjutan (Rahmawan et al., 2020). Penulis berargumen bahwa masa depan aktivisme digital di Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuan gerakan masyarakat sipil untuk beradaptasi dengan perubahan lanskap digital dan politik. Aktivis perlu mengembangkan strategi baru untuk menghadapi represi digital, mengatasi fragmentasi gerakan, dan membangun koalisi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Prospek ke depan, aktivisme digital di Indonesia kemungkinan akan semakin terintegrasi dengan gerakan transnasional dan solidaritas regional, seperti yang terlihat dalam fenomena #MilkTeaAlliance (Nugroho, 2025; Salma, 2024). Konektivitas digital memungkinkan aktivis Indonesia untuk belajar dari pengalaman gerakan di negara lain dan membangun jaringan solidaritas lintas batas (Wendratama, 2025). Untuk memperkuat efektivitas aktivisme digital, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi digital dan media di kalangan masyarakat luas, membangun infrastruktur teknologi yang mendukung akses internet yang lebih inklusif, dan memperjuangkan regulasi yang melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital (Wahyuningroem et al., 2024; Lim, 2025). Hanya dengan fondasi yang kuat ini, aktivisme digital dapat menjadi kekuatan transformatif yang berkelanjutan dalam memperdalam demokrasi Indonesia.

3.6. Upaya Meningkatkan Efektivitas Aktivisme Digital di Indonesia

Aktivisme digital lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia, diperlukan serangkaian upaya strategis yang komprehensif. Pertama, peningkatan literasi digital dan media menjadi fondasi penting bagi efektivitas gerakan sosial digital (Rahmawan et al., 2020; Wendratama, 2025). Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis menggunakan platform media sosial, tetapi juga kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi, memahami mekanisme algoritma, dan mengidentifikasi disinformasi (Nugroho, 2025). Aktivis dan organisasi masyarakat sipil perlu menyelenggarakan program pelatihan literasi digital secara masif untuk memperluas basis partisipasi yang berkualitas dalam gerakan sosial digital.

Kedua, membangun ekosistem aktivisme digital yang berkelanjutan melalui penguatan jaringan dan koalisi lintas sektor (Ahmad & Setyawati, 2024; Salma, 2024). Fragmentasi gerakan sering kali mengurangi efektivitas tekanan terhadap pemerintah, sehingga diperlukan platform koordinasi yang dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai kelompok aktivis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media (Asmiyono & Rahmawati, 2025). Pembentukan koalisi yang solid dapat meningkatkan kapasitas gerakan dalam menghadapi represi dan mempertahankan momentum jangka panjang (Wahyuningroem et al., 2024).

Ketiga, mengoptimalkan strategi komunikasi digital dengan memahami dan memanfaatkan logika platform media sosial secara strategis (Rahmawan et al., 2020; Lim, 2025). Aktivis perlu mengembangkan konten yang tidak hanya informatif tetapi juga resonan secara emosional dengan audiens, menggunakan data visualisasi yang menarik, dan memanfaatkan storytelling yang kuat untuk membangun empati dan dukungan publik (Ahmad & Setyawati, 2024). Pemahaman tentang timing optimal, penggunaan hashtag yang efektif, dan strategi engagement yang tepat dapat memaksimalkan jangkauan dan dampak kampanye digital (Sulaiman, 2024). Penulis berargumen bahwa efektivitas aktivisme digital juga bergantung pada kemampuan gerakan untuk mengintegrasikan strategi online dan offline secara sinergis. Media sosial seharusnya tidak dipandang sebagai pengganti aksi nyata di lapangan, tetapi sebagai alat yang memperkuat mobilisasi dan memperluas jangkauan gerakan. Dokumentasi aksi offline yang disebarluaskan melalui media sosial dapat menciptakan efek pengganda yang memperkuat legitimasi dan dukungan publik terhadap gerakan.

Keempat, memperkuat kapasitas menghadapi represi digital dan disinformasi melalui pengembangan mekanisme perlindungan aktivis dan strategi counter-narrative yang efektif (Lim, 2025; Wendratama, 2025). Aktivis perlu memahami keamanan digital, menggunakan enkripsi dan alat komunikasi yang aman, serta membangun sistem early warning untuk mengantisipasi represi (Salma, 2024). Untuk menghadapi kampanye disinformasi, gerakan perlu membangun tim *fact-checking* yang cepat dan kredibel, serta mengembangkan narasi tandingan yang berbasis data dan fakta (Asmiyono & Rahmawati, 2025; Nugroho, 2025).

Kelima, membangun keberlanjutan gerakan melalui pengembangan kepemimpinan kolektif dan regenerasi aktivis (Wahyuningroem et al., 2024; Ahmad & Setyawati, 2024). Model kepemimpinan horizontal yang terdesentralisasi perlu didukung dengan mekanisme kaderisasi dan transfer pengetahuan yang sistematis (Rahmawan et al., 2020). Program mentoring, workshop strategis, dan dokumentasi pengalaman gerakan dapat membantu mempertahankan institutional memory dan memperkuat kapasitas generasi aktivis berikutnya (Nugroho, 2025).

Keenam, mendorong kebijakan publik yang mendukung ruang sipil digital yang demokratis dan inklusif (Wendratama, 2025; Lim, 2025). Aktivis dan organisasi masyarakat sipil perlu terlibat aktif dalam advokasi kebijakan untuk melindungi kebebasan berekspresi online, menolak regulasi yang represif, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas

platform media sosial (Salma, 2024). Kolaborasi dengan parlemen, lembaga hak asasi manusia, dan organisasi internasional dapat memperkuat posisi tawar gerakan dalam menghadapi penyempitan ruang sipil (Wahyuningroem et al., 2024).

Ketujuh, memanfaatkan teknologi dan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan gerakan (Rahmawan et al., 2020; Sulaiman, 2024). Penggunaan tools digital seperti aplikasi crowdsourcing untuk pengumpulan data, platform koordinasi online untuk mengorganisir aksi, dan teknologi blockchain untuk transparansi pendanaan dapat meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas gerakan (Ahmad & Setyawati, 2024). Inovasi dalam penggunaan artificial intelligence untuk analisis sentimen publik dan prediksi tren juga dapat membantu aktivis dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif (Asmiyono & Rahmawati, 2025).

Kedelapan, membangun solidaritas transnasional dan belajar dari pengalaman gerakan digital di negara lain (Nugroho, 2025; Salma, 2024). Konektivitas digital memungkinkan aktivis Indonesia untuk terhubung dengan gerakan global seperti #MilkTeaAlliance dan berbagi pengalaman, strategi, dan sumber daya (Lim, 2025). Pembelajaran dari best practices gerakan sosial digital di berbagai negara dapat memperkaya repertoire strategi dan meningkatkan efektivitas aktivisme digital di Indonesia (Wendratama, 2025; Wahyuningroem et al., 2024).

4. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme digital telah menjadi fenomena penting dalam partisipasi politik generasi muda Indonesia, sebagaimana tercermin dalam gerakan #ReformasiDikorupsi dan #TolakOmnibusLaw. Kedua gerakan ini berhasil memobilisasi massa secara masif melalui kombinasi strategi online dan offline, membentuk identitas politik kolektif, dan memberikan tekanan signifikan terhadap kebijakan publik. Strategi utama yang digunakan meliputi pemanfaatan multi-platform media sosial dan pengorganisasian aksi hybrid yang menggabungkan aktivisme digital dengan demonstrasi offline. Secara spesifik, penelitian ini menemukan kebaruan dalam strategi pembungkaman isu, yakni melalui penggunaan satire visual untuk mendekonstruksi wibawa pejabat serta pemanfaatan simbol budaya populer (K-Pop) yang terbukti efektif menjembatani partisipasi politik generasi Z. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa gerakan tersebut memiliki daur hidup panjang; tagar yang muncul di 2019 bertransformasi menjadi narasi 'Indonesia Gelap' di tahun 2025, menandakan bahwa media sosial berfungsi sebagai arsip perlawanan yang merawat ingatan publik.

Media sosial terbukti memainkan peran sentral dalam pembentukan identitas politik dan mobilisasi massa. Platform digital memfasilitasi partisipasi horizontal yang lebih inklusif dan demokratis, memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dalam membentuk agenda gerakan. Efektivitas aktivisme digital dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aksesibilitas internet, pemahaman terhadap logika platform, kredibilitas informasi, kemampuan membangun koalisi lintas sektor, dan dukungan dari figur berpengaruh. Namun, aktivisme digital di Indonesia juga menghadapi tantangan serius berupa penyempitan ruang sipil, represi digital oleh negara, kampanye disinformasi, algoritma media sosial yang menciptakan echo chamber, kesenjangan digital, dan fragmentasi gerakan. Tantangan-tantangan ini memerlukan respons strategis dari gerakan masyarakat sipil untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas aktivisme digital.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktivisme digital telah melampaui kritik sebagai slacktivism dan telah menjadi kekuatan politik yang signifikan dalam lanskap demokrasi Indonesia kontemporer. Masa depan aktivisme digital akan bergantung pada kemampuan gerakan untuk beradaptasi dengan perubahan lanskap digital dan politik, meningkatkan literasi digital masyarakat, membangun koalisi yang inklusif, dan memperjuangkan regulasi

yang melindungi kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan fondasi yang kuat, aktivisme digital dapat menjadi kekuatan transformatif yang berkelanjutan dalam memperdalam demokrasi dan mendorong perubahan sosial di Indonesia.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para aktivis digital dan pengguna platform X (Twitter) yang telah menjadi subjek analisis dalam studi ini; keberanian dan kreativitas narasi mereka adalah nyawa utama dari penelitian ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan diskusi yang telah memberikan masukan berharga terhadap draf naskah ini. Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Y. T., & Setyawati, L. (2024). *Digital activism and collective identity: "No viral no action" as connective action among youth on Jakarta's air pollution issue*. JPIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial), 33(1), 15–34.
- Asmiyono, E., & Rahmawati, D. E. (2025). *Social movements in the digital age: A bibliometric analysis of strategies and structures in achieving social change*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 38(2), 156–169.
- Catfish [@karimwidia391]. (2025, 29 Agustus). *Kukira aku bakal denger lagu EXO MAMA di konser, taunya jadi backsound suasana demo negeri ku* [Tweet]. X. <https://x.com/karimwidia391/status/1961405129002983657?s=20>
- Bahri, M. T., & Widhyharto, D. S. (2021). *Twitter based digital social movement pattern to fight COVID-19*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25(2), 95–112.
- Fraksi Rakyat Indonesia [@FraksiRakyatID]. (2023, 10 Agustus). *Masih berlangsung aksi sejuta buruh #TolakOmnibusLaw yang sudah terbukti gagal dan malah menyengsarakan rakyat* [Tweet]. X. <https://x.com/FraksiRakyatID/status/1689616248659955712?s=20>
- IntanCans [@Intan__1_]. (2025, 26 September). *Komisi demi komisi jadi mesin cuan elit, rakyat cuma jadi bahan jualan janji tiap pemilu* [Tweet]. X. https://x.com/Intan__1_/status/1971500596420325428?s=20
- Lim, M. (2025). *In Curhat we unite (and divide): Scalable affective sociality, algorithmic politics, and social media in Indonesia*. Indonesia, 119(1), 39–57.
- Nugroho, B. H. (2025). *Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements*. Priviet Social Sciences Journal, 5(10), 91–105.
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, A. P. (2020). *Strategi aktivisme digital di Indonesia: Aksesibilitas, visibilitas, popularitas, dan ekosistem aktivisme*. Jurnal Manajemen Komunikasi, 4(2), 123–244.
- Salma, A. N. (2024). *Hybrid movements, digital technology, and the rise and fall of far-right Islamist protest mobilization in Indonesia*. Muslim Politics Review, 3(1), 45–83.
- Sulaiman, A. (2024). *Media digital dan gerakan sosial: Analisis logika aksi konektif*. Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi, 5(2), 1913–1920.
- Suwana, F. (2020). *What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia*. Information, Communication & Society, 23(9), 1295–1310.
- Wahyuningroem, S. L., Sirait, R., Uljanatunnisa, U., & Heryadi, D. (2024). *Youth political participation and digital movement in Indonesia: The case of #ReformasiDikorupsi and #TolakOmnibusLaw*. F1000Research, 12, 1–25.
- Wendratama, E. (2025). *Digital activism for press freedom advocacy in post-authoritarian Indonesia*. Journalism and Media, 6(3), 101–119.